BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini menjadikan penerapan sistem informasi akuntansi sebagai suatu keharusan karena dalam penerapan sistem informasi akuntansi menjadi penting untuk mengubah dari data ekonomi dikelola menjadi sebuah informasi akuntansi (Putri, 2019). Sistem informasi akuntansi dapat membantu pada sektor publik sebagai pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, sektor publik membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk membantu pelayanan publik pada masyarakat agar lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Delanty, 2013).

Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan layanan pada bagian pemerintah yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum seperti masyarakat tertentu. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berfokus pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Walaupun tidak berfokus terhadap profit, namun tetap menjadi perhatian terhadap kualitas kerja organisasi pemerintahan sehingga perlu adanya perbaikan dari seluruh komponen yang ada didalamnya selalu dilakukan (Putri, 2019).

Penghargaan atas kinerja karyawan diberikan melalui gaji. Sistem penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif (Putri, 2019). Dalam memberikan gaji, setiap perusahaan memiliki sistem yang berbeda-beda. Gaji yang diberikan kepada karyawan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan dan lama bekerja, ini merupakan suatu hubungan timbal balik antara perusahaan dengan karyawan (Krismiaji, 2010).

Gaji dan upah merupakan hal yang penting bagi perusahaan dan karyawan karena bagi perusahaan gaji dan upah adalah alat yang dapat mendorong karyawan untuk tetap bekerja, serta merupakan biaya yang cukup besar bagi perusahaan. Sedangkan bagi karyawan gaji dan upah merupakan sumber penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya (Dewi, 2014).

Penggajian merupakan proses yang sangat penting untuk diperhatikan karena berhubungan langsung dengan kualitas kerja dari suatu instansi. Penggajian baik bagi karyawan maupun instansi terkait merupakan salah satu aspek yang paling berarti. Besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai dari kinerja seseorang karena gaji mempunyai arti penting bagi pegawai pemerintahan sebagai individu. Gaji dapat diketegorikan sebagai hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu utnuk menuntut orang lain memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga, dengan demikian, gaji muncul sebagai hak tagih karena prestasi kerja (Yusuf, 2010).

Setiap instansi pemerintah telah difasilitasi berupa sistem yang akan menjadi pendukung dengan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan kualitas

kerja dalam instansi tersebut. Dengan adanya sistem informasi akuntansi bagi pegawai diwajibkan memiliki prosedur kerja yang jelas sebagai standar kerja setiap intansi pemerintahan. Sebagai pendukung peningkatan kinerja pemerintah memberikan anggaran bagi pelaksana operasional di setiap instansi pemerintahan. Hal tersebut menjadikan suatu dukungan diperbaikinya sistem yang akan digunakan yaitu salah satunya sistem informasi akuntansi untuk penggajian (Ilmiana, 2016).

Sistem informasi akuntasi merupakan suatu komponen yang terpenting untuk dijadikan penentu bagi seluruh keputusan yang nantinya akan diambil oleh pemimpin organisasi tersebut. Informasi dianggap sangat penting karena dapat mengimbangi antara pengetahuan dari masing-masing orang dengan kesepakatan para pemimpin dalam mengambil suatu keputusan yang efektif dan efisien. Dalam hal kepegawaian yang terkait dengan melengkapi data pegawai adalah bagian dari informasi yang penting dari instansi pemerintah karena data pegawai tersebut dimulai dari pangkat, golongan, status dan penggajian. Informasi mengenai gaji pegawai merupakan salah satu bagian dari informasi keuangan dalam suatu instansi yang sudah disesuaikan dengan jabatan, masa kerja, absensi dan golongan. Sehingga akan menghasilkan hasil atau dari suatu sistem yang berelasi antara satu dengan yang lain berupa perhitungan gaji pegawai disebut dengan sistem informasi penggajian (Delanty, 2013).

Sistem informasi akuntansi penggajian merupakan sebuah program yang ada pada suatu pemerintah, di mana program-program tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga secara otomatis komputer akan melakukan pengolahan terhadap data-data yang dimasukkan kedalam sistem

untuk tujuan tertentu. Sistem akuntansi pembayaran gaji dan upah dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu dalam pembuatan pelaporan penggajian karena dalam sistem tersebut adanya perincian mengenai elemen-elemen gaji dan upah seperti macam-macam tunjangan yang diberikan perusahaan dan macam-macam potongan yang dikenakan terhadap gaji kotor atau upah kotor termasuk pajak penghasilan yang mendapatkan total dari pendapatan bersih tiap-tiap karyawan itu sendiri (Putri, 2019). Penelitian Liusnardo (2010) yang menyatakan sistem informasi akuntansi penggajian berpengaruh positif dan signifikan terhadap keakuratan pembayaran gaji. Hasil penelitian Septiani (2013) dan Putri (2019) yang menyatakan sistem informasi akuntansi penggajian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggajian karyawan.

Sistem apabila tidak didukung oleh pengendalian internal maka tidak akan berjalan efektif. Pengendalian internal merupakan proses untuk pemantauan terhadap manajemen agar mengetahui tindakan apa yang dilakukan serta bagaimana tindakan koreksinya jika tidak sesuai dengan kesepakatan pada perencanaan semula dan sistem pengendalian intern dikatakan memadai jika dalam penerapannya dengan semua tujuan dapat tercapai (Wibowo, 2013).

Pengendalian internal sebagai alat untuk pengawasan yang menjamin ketelitian, ketepatan gaji terhadap pegawai. Apabila tidak didukung oleh pengawasan yang merupakan bagian dari pengendalian internal maka tidak akan berjalan efektif. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya kecurangan dan penyelewengan sistem penggajian. Dalam sistem akuntansi terdapat pengendalian internal yang baik, dimana akan membuat proses pelaksanaan menjadi lebih terkontrol sehingga terdapat hubungan antara sistem akuntansi dan system

pengendalian internal. Jika dilihat dari kasus diatas fasilitas berupa sistem berbasis teknologi yang diberikan oleh pemerintah semestinya dapat dipergunakan dengan baik, namun yang terjadi banyaknya kecurangan yang bisa dilakukan oleh para pegawai untuk kepentingan invididu. Ketidakakuratan pencatatan data pada sistem informasi penggajian merupakan akibat dari ketidakdisiplinan melakukan absensi. Pegawai yang tidak bekerja tetapi tetap menerima gaji yang sama dengan pegawai yang bekerja sesuai jam kerja yang mengakibatkan menurunnya kinerja organisasi tersebut (Putri, 2019).

Efektifitas penerapan sistem yang menjadi pelaksana adalah pegawai dalam melaksanakan kegiatan operasional, setiap instansi pemerintahan diperlukan adanya manajemen yang baik yang ditunjang oleh personil yang berkualitas agar dapat berkarya secara efisien (Liusnardo, 2010). Kualitas sistem pengendalian internal di bidang penggajian menjadi faktor penentu dalam keakuratan perhitungan gaji pegawai diantaranya latar belakang pendidikannya, pengalaman, pelatihan yang diperoleh dan profesionalismenya. Menurut penelitian Septiani (2013) dan Adzhani (2015) yang menyatakan sistem informasi akuntansi penggajian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akurasi pembayaran gaji karyawan. Hasil penelitian Rosita dan Wijaya (2019) menemukan bahwa sistem pengendalian intern penggajian berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Keberhasilan penggajian didukung oleh pelaksana penggajian dan penerima gaji itu sendiri. Pegawai sebagai penerima gaji sudah seharusnya disiplin terhadap aturan yang telah ditetapkan. Agar proses penggajian dapat dijalankan maka setiap persyaratan harus dipenuhi, misalnya pengumpulan berkas riwayat hidup untuk penentuan golongan gaji untuk penentuan insentif. Kesalahan data yang

dikumpulkan oleh pegawai penggajian bisa disebabkan dari kesalahan data bawaan yang sebelumnya dikumpulkan oleh pegawai terkait yang nantinya akan berhubungan dengan profesionalitas pegawai tersebut untuk menerima dan melaksanakan suatu aturan. Kualitas pengawasan pada bagian pengendalian internal yang ditekankan adalah profesionalitas sebagai seorang pegawai negeri sipil (Kasanah, 2017).

Sistem absensi pada intansi pemerintahan diperlukan guna mempermudah bagi pihak administrasi untuk membuat sebuah laporan dalam kebutuhan informasi yang akurat, tepat dan cepat dalam penyajian data yang lengkap merupakan salah satu tujuan penting yang akan mempermudah pekerjaan seseorang. Sistem absensi yang digunakan oleh instansi pemerintah berfungsi untuk mencatat jam hadir dan jam kerja pegawai. Akumulasi perhitungan jam kerja tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap gaji (insentif) yang akan diterima oleh pegawai terkait. Pegawai diharapkan dapat memenuhi kewajiban dan disiplin terhadap jam kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian Saragih (2010), Hamonangan (2017), Putri (2019) yang menyatakan sistem absensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keakuratan informasi penggajian.

Pemerintah telah melaksanakan perbaikan dalam bidang penggajian. Hal tersebut terbukti dengan adanya pemberitaan mengenai penanganan masalah penggajian yaitu perbaikan sistem absensi. Berlaku mulai Januari 2020 ini, sistem absensi yang digunakan oleh instansi pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk membantu proses pencatatan jam hadir dan jam kerja pegawai. Kedisiplinan

pegawai diharapkan dapat dilaksanakan terhadap jam kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Setiap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sudah seharusnya dipergunakan dengan baik agar terhindar dari masalah-masalah yang bisa saja terjadi akibat penggunaan secara tidak disiplin. Penggunaan sistem absensi semakin berkembang keseluruh instansi pemerintahan tidak terkecuali pada daerah pemerintahan di Bali. Pemerintah Kabupaten Badung kini telah menerapkan sistem absensi sidik jari dan wajah secara online. Dalam penerapan sistem ini adanya ketidakdisiplinan terhadap pegawainya. Untuk mengantisipasi adanya pegawai yang secara sengaja titip absen merupakan salah satu jawaban dari adanya absensi sidik jari dan wajah tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Badung I Gede Wijaya, menjelaskan bahwa absen sidik jari yang diterapkan masih memiliki kelemahan, karena adanya pegawai yang menitipkan absensi melalui absen pegawai yang menitip. Nomor absen tersebut diketik secara manual di mesin fingerfrint. *(Nusa Bali 21 Agustus 2018, diakses 01 Januari 2020).*

Kasus pegawai yang melakukan titip absen, juga terjadi pada instansi pemerintahan di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, ditemukan fenomena titip absen pada salah satu Kecamatan di Kabupaten Buleleng, walaupun telah menggunakan sistem *fingerprint*. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Kecamatan Buleleng (I Nyoman S) sebagai berikut:

> "Kalau masalah titip absen itu sudah bukan rahasia umum lagi, walaupun sudah pakai *fingerprint* ya masih bisa manipulasi karena nanti ada yang ngerekap, bisa itu diganti dari yang tidak hadir jadi hadir, tetapi ini oknum ya, bukan berarti semua pegawai seperti itu".

Berdasarkan hasil wawancara diatas, melalui sistem absensi yang telah ada saat ini, masih terdapat kelemahan ataupun celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pegawai yang kurang disiplin untuk melakukan manipulasi data-data kehadiran, sehingga dapat diketahui masih kurangnya efektivitas pengendalian internal atau sistem absensi yang telah ada saat ini.

Pada tahun 2020 sistem absensi yang diterapkan pada instansi di Kabupaten Buleleng akan mengalami transisi menuju sistem absensi berbasis online. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng, Gede Wisnawa mengatakan, absensi wajah yang mulai diterapkan ini khusus diperuntukkan bagi PNS. Sedangkan tenaga kontrak masih menggunakan absensi manual. Sebab, menurut Wisnawa, absensi wajah ini berkaitan dengan peningkatan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi PNS (baliexpress.jawapos.com, b2020). Namun berdasarkan berita yang dikutip dari NusaBali.com (2020), baru beroperasi tiga hari, penerapan sistem absen wajah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dikeluhkan. Sistem pengabsenan baru bagi PNS masih dinilai belum berfungsi optimal. Aplikasi yang didownload di ponsel masing-masing PNS sering kali tak berhasil saat digunakan untuk mengabsen. Sejak diujicobakan PNS di Lingkup Pemkab Buleleng sedikit sibuk mencari lokasi yang pas untuk merekam wajah mereka agar bisa terdeteksi dalam sistem di pengabsenan online tersebut. Namun kesibukan mencari tempat yang pas di sekitar Pemkab Buleleng terutama di luar ruangan tak menjamin perekaman absen wajah berjalan mulus. Beberapa dari PNS harus mencoba berulang kali dan akhirnya dapat terlambat mengabsen hingga tak berhasil sama sekali.

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah kabupaten terbesar di Bali, penyebaran penduduk cukup besar sehingga memiliki anggaran operasional yang besar pula termasuk anggaran gaji/upah pegawai. Setiap tahun jumlah pegawai semakin meningkat sehingga masalah penggajian akan semakin kompleks dan perlu diperhatikan. Terdapat standar khusus yang sudah ditetapkan pemerintah untuk penggajian (Keputusan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota) sehingga penelitian ini dapat dilakukan lebih efektif. Selain itu Kantor Camat di Kabupaten Buleleng memenuhi ketiga faktor yang ingin diteliti diantaranya menerapkan sistem informasi akuntansi penggajian, memiliki pegawai pelaksana penggajian dan pegawai yang menerima gaji serta menerapkan sistem absensi untuk mendukung data penggajian. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu Septiani (2013) dan Adzhani (2015) adalah adanya variabel sistem absensi yang masih jarang diteliti, disamping itu, di Kabupaten Buleleng sedang mengalami transisi sistem absensi dari teknologi fingerprint menuju G-Absensi, sehingga diperlukan penelitian mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggajian dilingkungan instansi pemerintahan. Peneliti memilih instansi pemerintah yaitu seluruh Kantor Camat di Kabupaten Buleleng, karena berdasrkan hasil wawancara awal, ditemukan kasus penitipan absen yang terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Buleleng. Maka dari hal tersebut judul penelitian ini adalah "**Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Absensi Terhadap Keakuratan Penggajian Pada Kantor Camat di Kabupaten Buleleng".**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikandiatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah memfasilitasi instansi pemerintahan dengan teknologi untuk menunjang kinerja pemerintahan, namun tidak menjamin terselesaikannya masalah-masalah dalam sebuah instansi salah satunya adalah masalah penggajian.
2. Fasilitas berupa alat absen elektronik yang diberikan pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai, masih terdapat ketidakdisiplinan pegawai dalam penggunaan alat tersebut.
3. Ketidakdisiplinan melakukan absensi berakibat terhadap ketidakakuratan pencatatan data pada sistem informasi penggajian. Pegawai yang tidak bekerja dapat tetap menerima gaji sempurna sama dengan pegawai yang bekerja sesuai jam kerja, hal tersebut berakibat pada menurunnya kinerja organisasi dan tentunya kerugian bagi pemerintah.
4. Sistem informasi akuntansi penggajian penting dalam menunjang keakuratan perhitungan penggajian karena didalamnya terdapat data-data untuk menunjang proses penggajian.
5. Kualitas pengendalian internal dalam pengawasan baik pelaksana penggajian dan penerima gaji juga penting dalam menunjang keakuratan perhitungan penggajian, semakin profesional dan berkompetensi seorang pegawai menunjang keberhasilan proses penggajian.

6. Sistem absensi penggajian juga penting dalam menunjang keakuratan perhitungan penggajian, karena sistem ini mendukung data yang dibutuhkan dalam proses penggajian.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dan identifikasi masalah yang dilakukan maka peneliti membatasi masalah dengan hanya menggunakan tiga faktor yaitu sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, sistem absensi karena faktor tersebut telah diterapkan di seluruh instansi pemerintah namun belum efektif. Selain itu ketiga faktor ini merupakan kunci keberhasilan proses penggajian. Dalam penelitian ini, peneliti juga membatasi responden yaitu para pegawai yang bekerja pada Kantor Camat di Kabupaten Buleleng karena penulis menyasar instansi pemerintahan sebagai pelaku proses penggajian yang sudah memiliki standar khusus dalam penggajian.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap keakuratan penggajian pada Kantor Camat di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian inernal terhadap keakuratan penggajian pada Kantor Camat di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh sistem absensi terhadap keakuratan penggajian pada Kantor Camat di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap keakuratan penggajian pada Kantor Camat di Kabupaten Buleleng.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap keakuratan penggajian pada Kantor Camat di Kabupaten Buleleng.
3. Pengaruh sistem absensi terhadap keakuratan penggajian pada Kantor Camat di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis dapat memaparkan beberapa manfaat yang dapat diterima sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dihrapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan penggajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penggajian serta menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis atau pengembangan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini maka pemerintah dapat mengetahui pelaksanaan penggajian pada instansi pemerintahan khususnya

pada Kantor Camat di Kabupaten Buleleng sehingga dapat merancang program dan menetapkan peraturan yang mendukung optimalisasi pelaksanaan penggajian.

b. Bagi Pegawai Terkait

Bagi pegawai terkait, penelitian ini dapat menerangkan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk dapat mempertahankan keakuratan penggajian dan mempertahankan pula kepuasan kerja bagi pegawainya.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA